

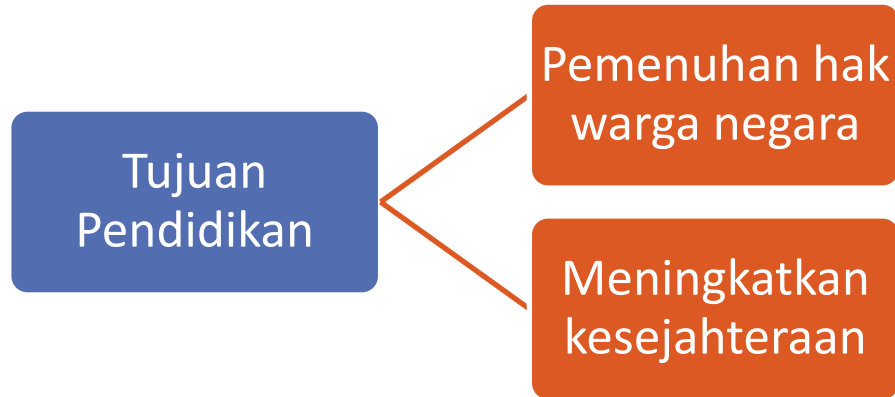
# Satu Dasawarsa Pemberantasan Korupsi Pendidikan, 2003-2013

**Divisi Monitoring Pelayanan Publik – Indonesia Corruption Watch**

**Jakarta, 29 Agustus 2013**



# Latar Belakang



- Pendidikan = **sektor strategis** bagi Indonesia
- Indonesia sedang **berperang melawan korupsi**.
- Publik berharap pendidikan dapat diandalkan untuk memerangi korupsi.
- Sayangnya, sektor pendidikan **justru “lumpuh” karena korupsi**
- Berbagai **upaya memerangi** korupsi hasilnya **belum maksimal**

# Satu Dasawarsa Korupsi Pendidikan

- Mengapa satu dasarwarsa ?
  - UU Sisdiknas sudah diberlakukan sejak 2003. peraturan ini juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan pendidikan.
- Tujuan Tren Korupsi Pendidikan :
  1. Mengungkap bagaimana pola korupsi pendidikan
  2. Mengungkap bagaimana pola penindakan korupsi pendidikan
  3. Menyusun rekomendasi untuk perbaikan tata kelola pendidikan

# Tren Pemberantasan Korupsi Pendidikan

- Metodologi

  - Kuantitatif Deskriptif

    - Pemantauan dilakukan selama 3 kali, yakni tahun 2008, 2010, 2013 dengan cara mengupdate hasil pemantauan sebelumnya

    - Sumber data : Media cetak dan online serta jaringan masyarakat sipil di Indonesia pada tahun 2008

- Tabulasi dan pengolahan data menggunakan SPSS (Statistical Package for Social Science) dan Ms Excel.
- Kekurangan: media online tidak menggambarkan keadaan praktek korupsi yang sesungguhnya

# Pertanyaan terkait Tren Korupsi Pendidikan

- **Pertama**, bagaimana perkembangan kasus korupsi yang terjadi pada dunia pendidikan? Apakah jumlah dan kerugian negara meningkat, menurun atau stagnan?
- **Kedua**, manakah diantara dana pendidikan sering dikorup dan seberapa besar?
- **Ketiga**, apakah pola atau modus paling sering yang digunakan untuk menyelewengkan dana pendidikan? Apakah ada perbedaan modus korupsi yang digunakan antar berbagai dana pendidikan pendidikan ?
- **Keempat**, lembaga manakah yang paling banyak menyelewengkan dana pendidikan?
- **Kelima**, dimanakah lokasi (provinsi) korupsi pendidikan terbanyak ?
- **Keenam** bagaimana tren penindakan kasus korupsi pendidikan? Apakah meningkat, menurun atau stagnan. Berapa persentase keberhasilan penindakan kasus korupsi pendidikan yang mampu menjerat **koruptor ke penjara** dan mengembalikan kerugian negara?

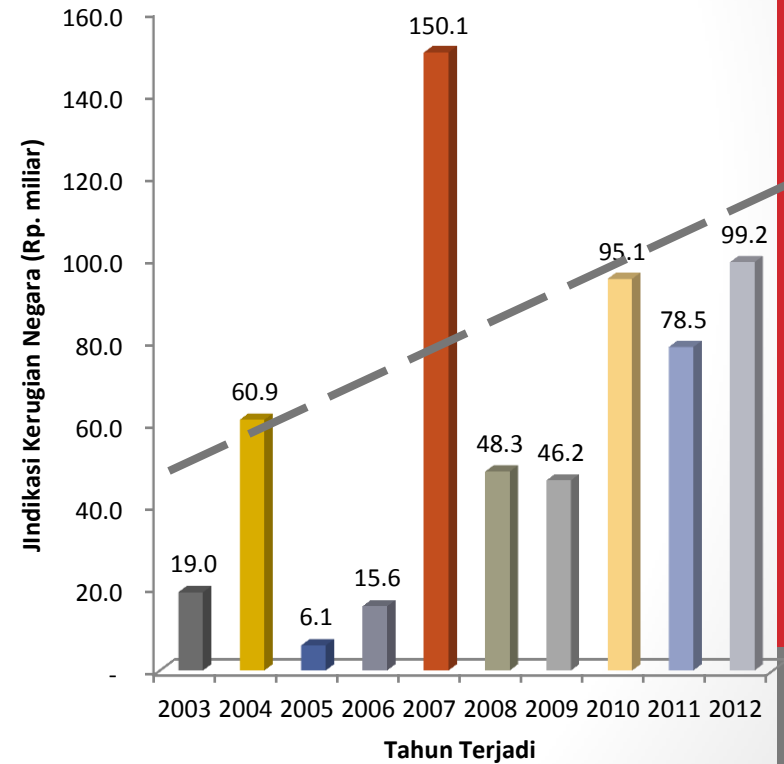
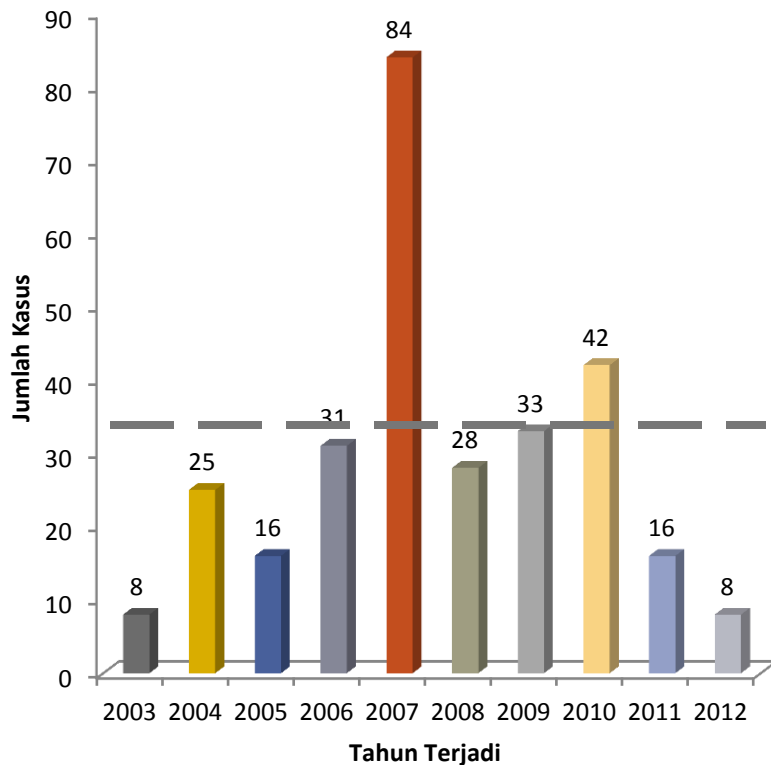
# Hasil Pemantauan

Berdasarkan pemantauan ICW diketahui bahwa selama 2003-2013, penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) berhasil menindak kasus korupsi pendidikan sebanyak

**296 kasus dengan indikasi kerugian negara sebesar Rp 619,0 miliar..!!!**

# Tren Korupsi Pendidikan Menurut Tahun Terjadi

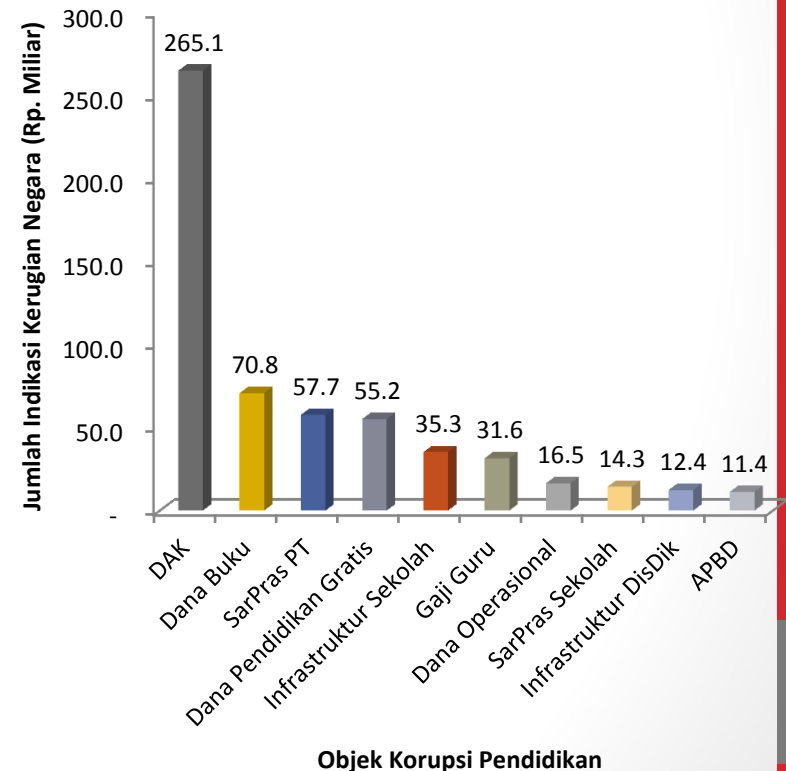
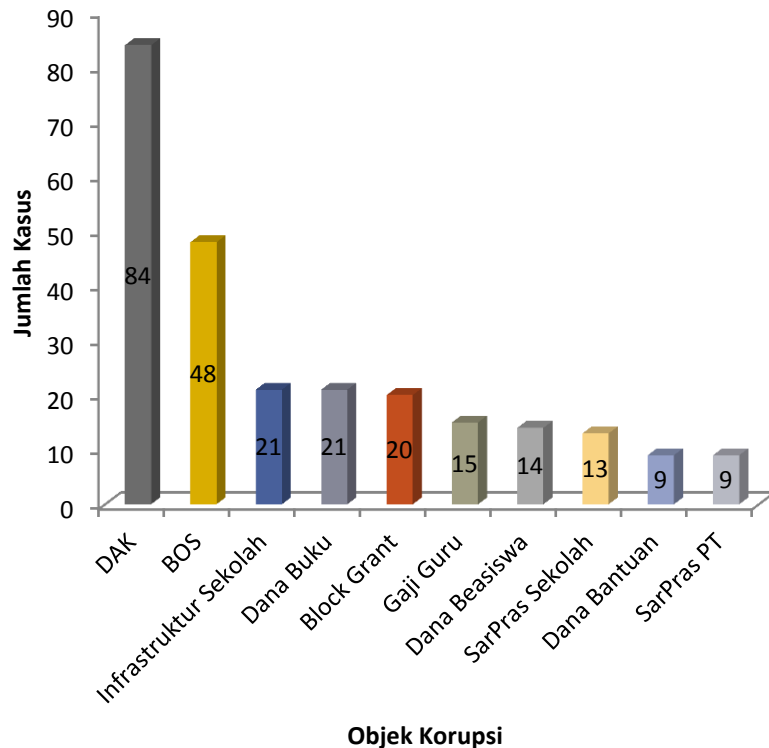
Tidak ada tren terkait jumlah kasus korupsi. Namun, ada tren meningkat pada indikasi kerugian negara. Tahun 2003 dan 2012 miliki jumlah kasus yang sama namun dengan kerugian negara berbeda, yakni 8 kasus sedangkan indikasi kerugian negara 2003 Rp 19,0 miliar dan 2012 Rp 99,2 miliar. Kesimpulan, jumlah kasus korupsi pendidikan tidak meningkat namun kerugian negara semakin meningkat signifikan setiap tahunnya.



5 kasus belum diketahui tahun terjadinya

# Korupsi Pendidikan Menurut Objek Korupsi

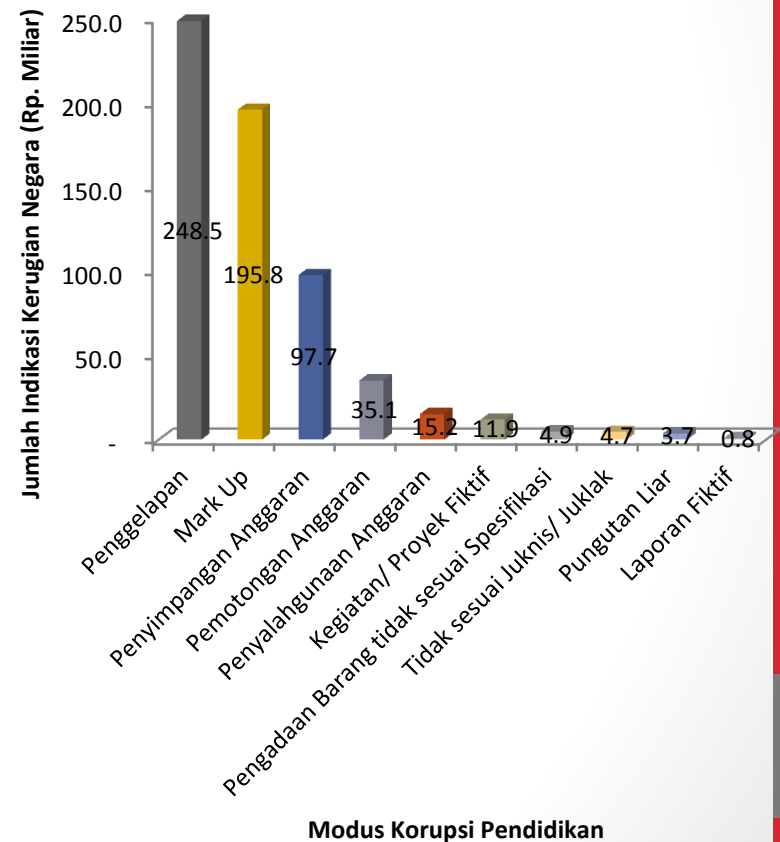
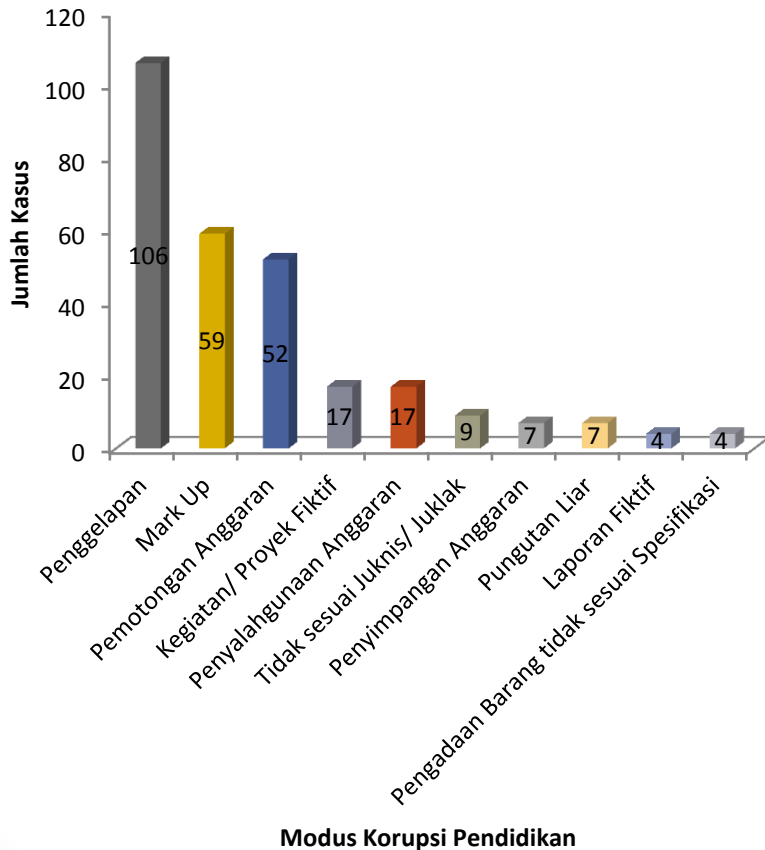
DAK adalah dana pendidikan yang paling sering di korupsi dengan jumlah 84 kasus dan kerugian negara terbesar Rp. 265,1 miliar. BOS merupakan kasus terbanyak kedua dengan jumlah 48 kasus. Namun, kerugian negara dari dana BOS terlalu kecil sehingga tidak masuk 10 besar. Korupsi terkait sarpars PT jumlah kasusnya 9, namun kerugian negaranya mencapai Rp. 57,7 miliar.





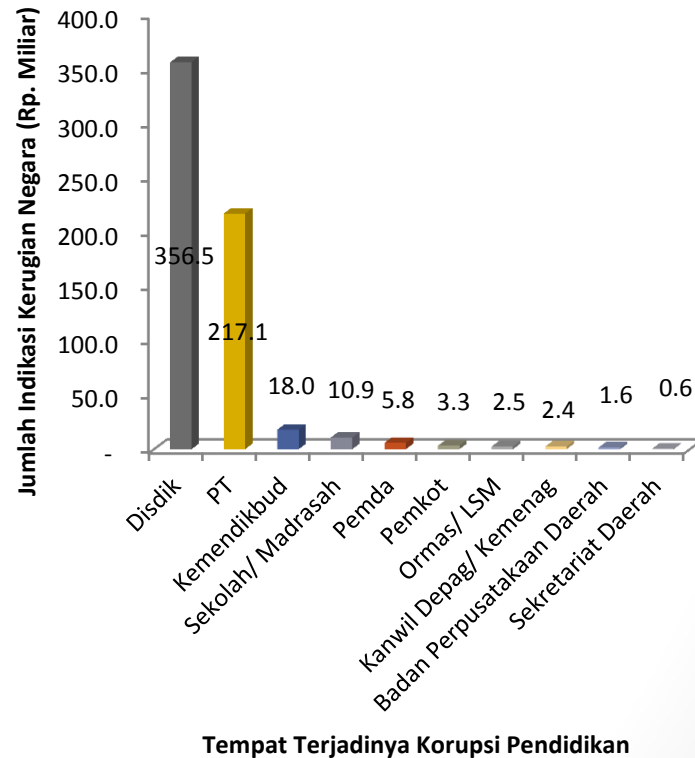
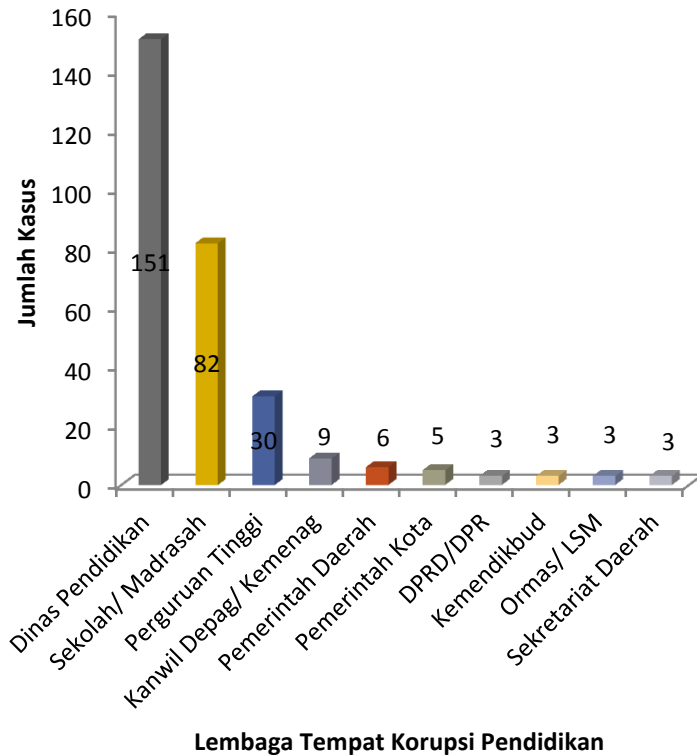
# Korupsi Pendidikan Menurut Modus Korupsi

Penggelapan adalah modus korupsi yang paling sering digunakan dengan jumlah 106 kasus dan indikasi kerugian negara Rp. 248,5 miliar. Penggelapan sering digunakan untuk menyelewengkan dana BOS dan DAK. Hampir 50 persen dari kasus dengan modus penggelapan terjadi pada dana BOS dan DAK. Dua dana ini merupakan dana yang mudah diselewengkan dengan cara penggelapan.



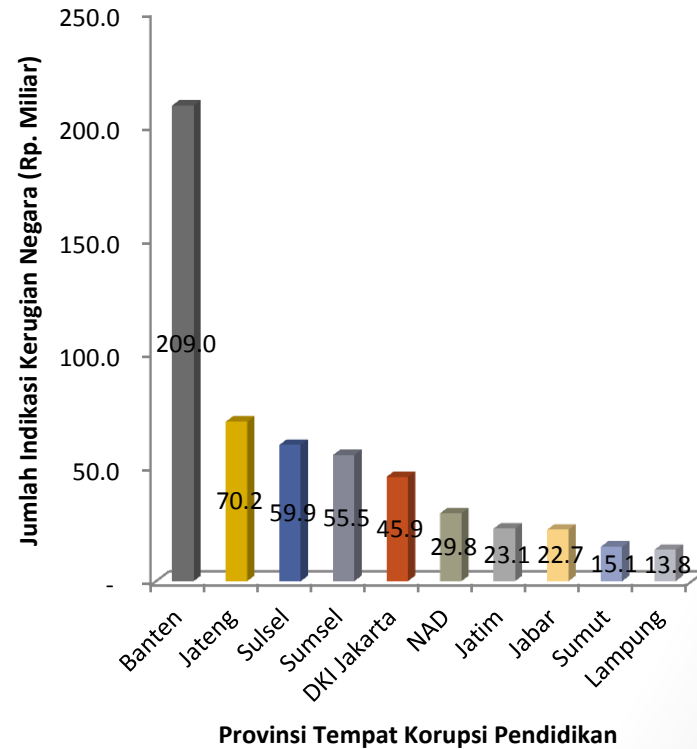
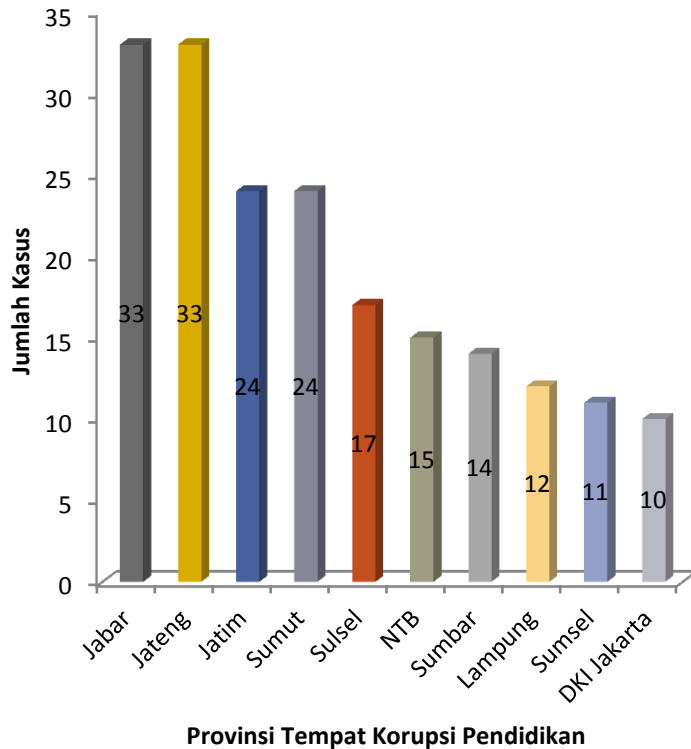
# Korupsi Pendidikan Menurut Lembaga Tempat Korupsi

Dinas Pendidikan merupakan tempat terjadinya korupsi paling banyak 151 kasus, dengan indikasi kerugian negara paling besar Rp. 356,5 miliar. Hal yang menarik adalah, lembaga seperti Kemdikbud dan Perguruan Tinggi yang menjadi tempat korupsi pendidikan paling banyak kedua dan ketiga kerugian negaranya. Meskipun jumlah kasus korupsi yang terjadi di PT dan Kemendikbud secara kuantitas tidak banyak, namun sekali terjadi korupsi mengakibatkan kerugian negara yang banyak.



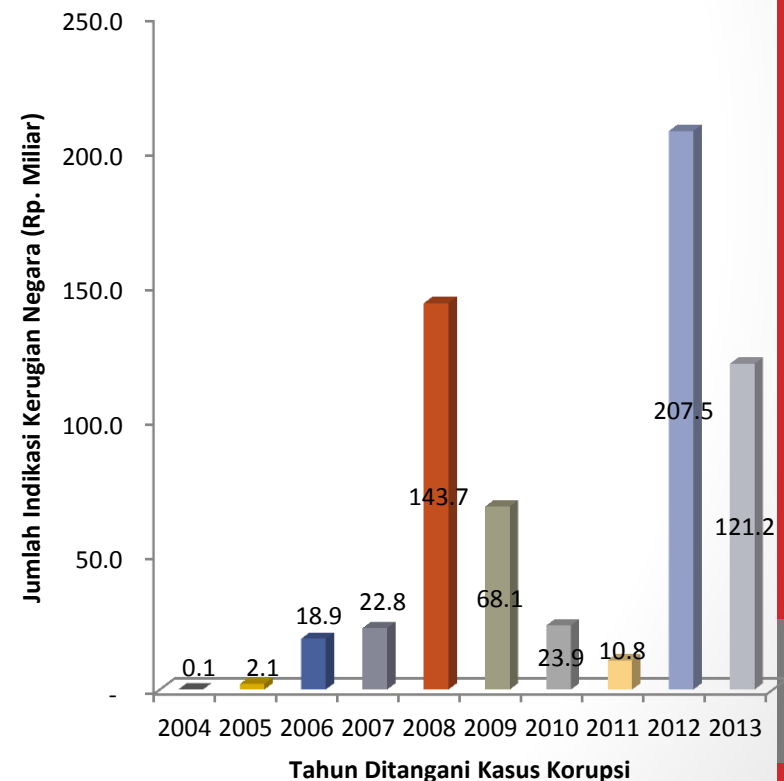
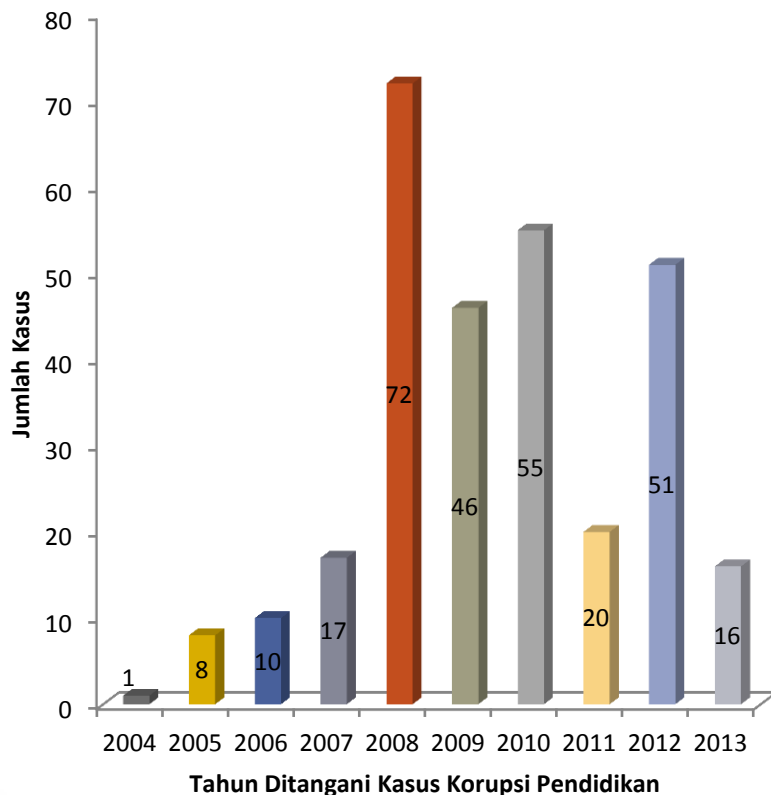
## Korupsi Pendidikan Menurut Provinsi Terjadinya Korupsi

Provinsi Jabar adalah provinsi yang paling banyak terjadi korupsi pendidikan yaitu 33 kasus namun kerugian negaranya tidak terbanyak, yaitu Rp. 22,7 miliar. Meskipun Jateng, Jabar, Jatim dan Sumut memiliki jumlah kasus paling besar akan tetapi kerugian negara terbesar tidak terjadi di empat provinsi ini. Kerugian negara dalam korupsi pendidikan justru ditempati oleh Banten dengan total kerugian sebesar Rp 209,0 miliar.

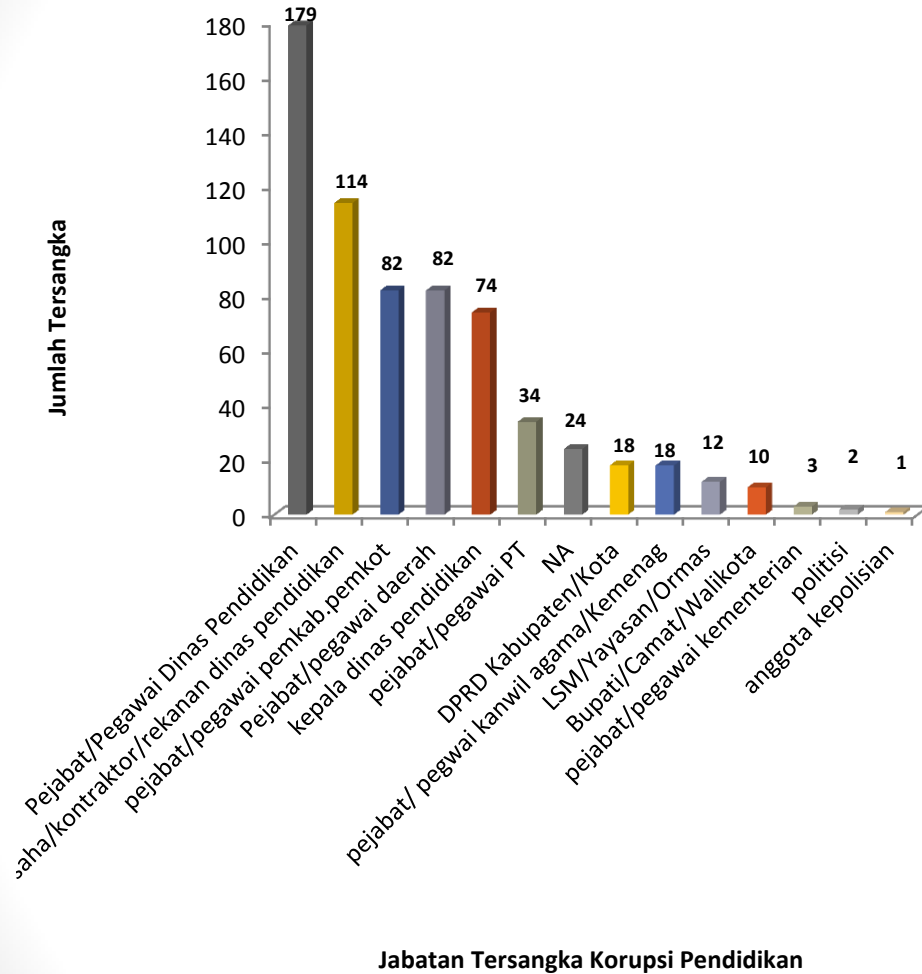


## Korupsi Pendidikan Menurut Tahun Ditanganinya Kasus

Penanganan kasus korupsi pendidikan paling banyak dilakukan pada tahun 2008 yaitu 72 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp 143,7 miliar. Meskipun demikian, indikasi kerugian negara terbanyak ada pada tahun 2012 dengan jumlah Rp. 207,5 miliar. Untuk tahun 2013, meskipun baru 16 kasus yang ditangani, namun kerugian negaranya sudah mencapai Rp. 121,2 miliar.



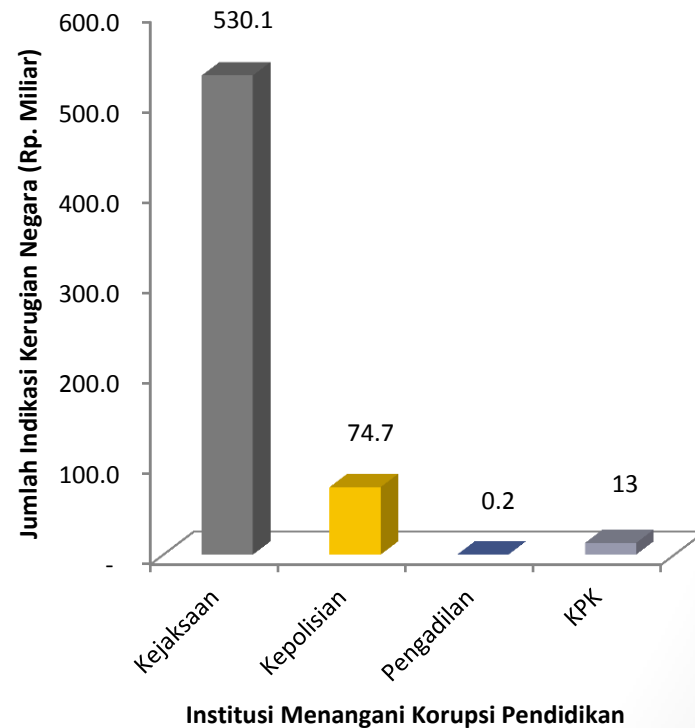
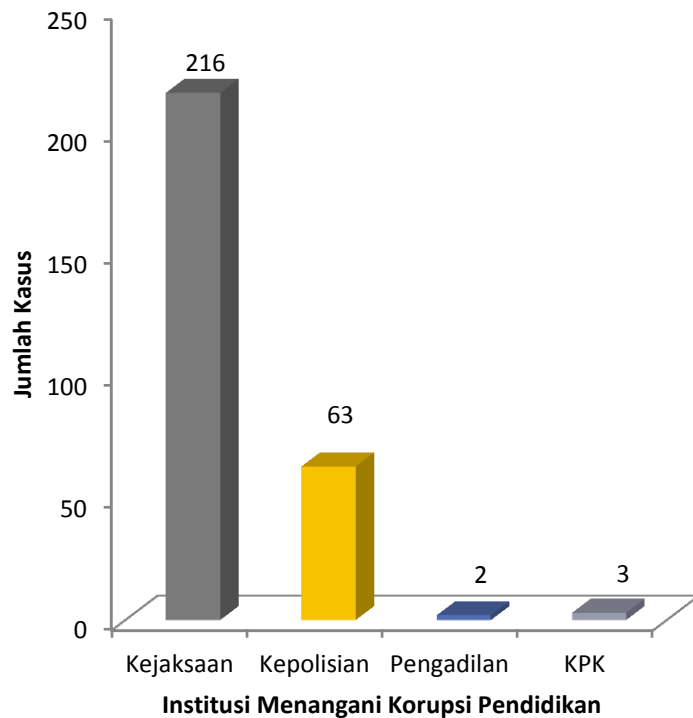
# Korupsi Pendidikan Menurut jabatan Tersangka Korupsi



- Dari 296 kasus korupsi yang berhasil di tangani oleh lembaga penegak hukum, jumlah tersangka yang sudah ditetapkan sebanyak 479 orang dari tahun 2003 – 2013.
- tersangka dalam korupsi pendidikan paling sering dilakukan oleh pejabat/pegawai dinas pendidikan, yaitu sebanyak 179 orang.
- Terbanyak kedua adalah tersangka dari pengusaha atau rekanan dinas pendidikan.
- Hal ini terkait dengan anggaran pendidikan yang paling sering di korupsi adalah DAK dengan modus mark up dan penggelapan. Sehingga pemain dalam korupsi tersebut seringkali adalah rekanan dan pejabat pembuat kesepakatan.

## Korupsi Pendidikan Menurut Lembaga Yang Menangani Kasus

Lembaga yang paling banyak menindak kasus korupsi adalah kejaksaan sebanyak 216 kasus dengan indikasi kerugian negara terbesar Rp. 530,1 miliar. Kemudian disusul kepolisian sebanyak 63 kasus dengan kerugian negara Rp. 74,7 miliar. KPK menangani 3 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp. 13 miliar. Dari 296 kasus, terdapat 12 kasus tidak diketahui penanganannya.



# Kesimpulan

- Tren korupsi pendidikan 2003 – 2013 berhasil mengumpulkan 296 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 479 orang dan kerugian negara Rp. 619 miliar.
- Dari tahun ke tahun, pola korupsi pendidikan masih serupa.
- Modus paling banyak = penggelapan dan mark up.
- Penggelapan dan mark up paling sering digunakan untuk praktek korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK).
- Korupsi di sektor pendidikan sudah terjadi sejak perencanaan.
- Contoh: kasus pengadaan barang di perguruan tinggi yang melibatkan Angelina Sondakh.
- Pola penindakan kasus korupsi di sektor pendidikan dapat dikatakan stabil dari tahun ke tahun. Tidak ada peningkatan signifikan. Padahal, kerugian negara membesar.

# Rekomendasi

- Bareskrim Mabes Polri dan Jampidsus Kejagung harus lebih serius untuk memantau penindakan kasus korupsi pendidikan di daerah, terutama masalah tindak lanjut penanganan kasus korupsi pendidikan.
- Pengelolaan anggaran pendidikan harus di sertai dengan peningkatan pengawasan dan partisipasi publik. Sekolah, Dinas Pendidikan, Kemendikbud, dan lembaga lainnya yang mengelola dana pendidikan wajib membuka perencanaan dan anggarannya ke masyarakat.
- BPK harus lebih aktif melakukan audit terhadap dana-dana pendidikan yang rutin dialokasikan, seperti DAK dan BOS. Sebab audit dapat meningkatkan pengawasan terhadap dana tersebut.